

DIPLOMASI PERTAHANAN LITTORAL STATES DI SELAT MALAKA MELALUI KERANGKA PATROLI SELAT MALAKA

THE LITTORAL STATES' DEFENSE DIPLOMACY IN THE MALACCA STRAIT THROUGH THE MALACCA STRAIT PATROL FRAMEWORK

Yuli Ari Sulistyani ¹

Universitas Pertahanan Indonesia
(yuliario8@gmail.com)

Abstrak – Selat Malaka sebagai salah satu selat yang memiliki nilai strategis dalam perdagangan dunia kerap menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional. Sesuai dengan UNCLOS, *littoral states* seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia berkewajiban untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Selat Malaka agar perdagangan dan ekonomi dunia tidak terganggu. Penelitian ini menganalisis bagaimana kerangka kerjasama *Malacca Straits Patrol* (MSP) dibentuk sebagai sebuah kerjasama yang dibentuk oleh *littoral states* dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Selat Malaka. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan konsep kerja sama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa MSP yang terdiri atas *Malacca Straits Sea Patrol* (MSSP), “*Eyes-in-the-Sky*” *Combined Maritime Air Patrols* (EiS), dan *MSP Intelligence Exchange Group* (IEG) merupakan salah satu bentuk aktivitas diplomasi pertahanan berupa *multilateral contacts between military officials* dan *multilateral military exercise* yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya dan kapabilitas pertahanan masing-masing negara.

Kata Kunci : selat malaka, *the malacca straits patrol framework*, ancaman, kerjasama pertahanan, diplomasi pertahanan

Abstract – *Malacca Strait, as one of strategic straits in the world trade, faces various non-traditional security threats. In accordance with UNCLOS, littoral states such as Indonesia, Singapore, and Malaysia are obligated to maintain the security in the Malacca Straits, so that the world trades and world economic are not disturbed. This study analyzes how the Malacca straits patrol (MSP) framework is formed by littoral states in order to maintain the security stability in the Malacca Strait. The researchers used qualitative method through literature study. The obtained data were analyzed using the theory of defense cooperation and concept of defense diplomacy. The results of the study shows that the MSP consisting of the Malacca Straits Sea Patrol (MSSP), “Eyes-in-the-Sky” Combined Maritime Air Patrols (EiS), and the MSP Intelligence Exchange Group (IEG) are classified as one of defenses diplomacy activities that are contacts between military officials and multilateral military exercises aimed at increasing mutual trust and defense capabilities of each country.*

Keywords: *malacca strait, the malacca straits patrol framework, threat, defense cooperation, defense diplomacy*

¹ Alumni Universitas Pertahanan, Program Studi Diplomasi Pertahanan Cohort 2, Fakultas Strategi Pertahanan.

Pendahuluan

Selat Malaka merupakan laut sempit yang membentang sepanjang 520 mil yang menjadi pintu utama di antara Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan.² Selat Malaka berada di antara dua daratan besar yaitu Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Saat ini, terdapat tiga negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia.³ Dengan kondisi geografis seperti itu, Selat Malaka sedikitnya dilayari oleh 200 kapal per hari, atau setidaknya 6.000 kapal per bulan, dan lebih dari 70.000-80.000 kapal per tahun.⁴

Peta Selat Malaka



Sumber: unav.edu

Selat Malaka menjadi salah satu selat tersibuk di dunia karena sebagai jalur perdagangan yang mencakup sepertiga dari total perdagangan dunia dan memfasilitasi pasokan energi dari Timur Tengah ke Asia Timur.⁵ Selain itu, 25% jalur di Selat Malaka digunakan sebagai jalur untuk kepentingan perdagangan dunia, dimana separuhnya merupakan kapal-kapal tanker minyak dan LNG.⁶ Selat Malaka juga menjadi jalur pelayaran internasional yang strategis karena menghubungkan wilayah Asia dengan Eropa dan Timur Tengah.⁷

Selat Malaka juga dikenal sebagai “Jalur Sutera” abad ke-21 yang menghubungkan wilayah timur dan barat.⁸ Selat Malaka menjadi selat dengan rute perdagangan tercepat yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan rute perdagangan yang cepat, maka Selat Malaka juga memberikan cost perjalanan yang paling murah dalam dunia transportasi laut.⁹ Selat Malaka merupakan salah satu dari sembilan *chokepoints* yang berperan sebagai *Sea Lanes of Trade* (SLOT) dan *Sea Lanes of Communications* (SLOC) bagi negara-

² Siti Zubaidah Ismail dan Mohd Azizuddin Mohd Sani, “The Straits of Malacca: Regional Powers Vis-A-Vis Littoral States in Strategic and Security Issues and Interests”, <https://core.ac.uk/download/pdf/12118559.pdf>, diakses pada 25 Juni 2019.

³ Annisa Lestari, *Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka : Tawaran Proliferasi Security Initiative 2006-2008*, Tesis, Ilmu Hubungan Internasional, (Depok: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 33.

⁴ Muhammad Taufan, “7 Hal yang Jarang Diketahui Tentang Selat Malaka”, 23 Juli 2018, dalam <https://kumparan.com/muhammad-taufan1530163979173/tujuh-hal-yang-jarang-diketahui-orang-tentang-selat-malaka-2743110790551702>, diakses pada 24 Juni 2019.

⁵ Andrew Manners, “Moving Forward, Slowly: India-Indonesia Relations in the Twenty-First Century,” *Strategic Analysis Paper*, 2014, hlm. 1-8.

⁶ Annisa Lestari, *op.cit.*

⁷ Sam J. Tangredi, “Globalization and Sea Power: Overview and Context”, dalam Sam J. Tangredi (ed.), *Globalization and Maritime Power*, Institute for National Strategic Studies, (Washington: National Defense University Press), hlm. 1-23.

⁸ Annisa Lestari, *op. cit.*

⁹ Mochammad Yuniarto, *Kontribusi Integrated Maritime Surveillance System Terhadap Penangkalan Ancaman di perairan Selat Malaka*, Tesis, Fakultas Strategi Pertahanan, (Bogor : Universitas Pertahanan, 2016), hlm. 6.

negara di dunia.¹⁰

Berdasarkan posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional, maka terdapat ancaman keamanan yang berkembang di Selat Malaka. Masalah keamanan maritim utama yang menjadi perhatian dunia di wilayah perairan Selat Malaka adalah *sea robbery* dan *armed robbery*.¹¹ Selain itu, ancaman yang terdapat di Selat Malaka mencakup ancaman keamanan non-tradisional dan transnasional seperti pembajakan, terorisme maritim, *illegal fishing*, *illegal logging*, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pelanggaran wilayah lalu lintas di laut.¹²

Isu terkait keamanan wilayah perairan Selat Malaka merupakan sebuah topik yang menjadi perhatian dunia internasional, karena jika isu-isu keamanan di Selat Malaka tidak dapat diselesaikan, maka hal tersebut akan berdampak terhadap perekonomian dunia, mengingat bahwa Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis, dimana 1/3 jalur perdagangan dunia melewati selat ini. Tantangan keamanan baik itu keamanan ekonomi dan juga maritim di wilayah perairan Selat Malaka menjadi kewajiban tiga *littoral states* yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia sesuai dengan hukum laut internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of*

The Sea (UNCLOS). Pada Bab 2 pasal 1 dan 2 UNCLOS, disebutkan bahwa:

“The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.” (Pasal 1)

“This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.” (Pasal 2)

Bagi Indonesia, Selat Malaka merupakan bagian dari integritas teritorial dan pertahanan negara, sehingga harus dilindungi keamanannya. Bagi Malaysia, Selat Malaka merupakan fasilitator penting dalam perdagangan dan menjadi penyedia sumber daya alam. Kemudian, bagi Singapura, Selat Malaka merupakan jalur kehidupan ekonomi karena perekonomian Singapura bergantung pada sektor perdagangan barang dan jasa maritim.¹³

Dengan kepentingan nasional *littoral states* tersebut, maka negara-negara tersebut sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah Selat Malaka melalui *The Malacca Strait Patrol (MSP) Framework* yang dibentuk pada tahun 2004. MSP terdiri atas *Malacca Straits Sea Patrol (MSSP)*, “*Eyes-in-the-Sky*” *Combined Maritime Air Patrols (EiS)*, dan *MSP Intelligence Exchange Group (IEG)*.¹⁴ Dengan demikian, tulisan ini akan

¹⁰ Hartanto, *Ancaman Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Selat Malaka (Kajian Laporan IMB Periode 2016) Terhadap Tegaknya Kedaulatan NKRI*, Tesis, Fakultas Strategi Pertahanan, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2016), hlm. 2.

¹¹ Mochammad Yuniarto, *op.cit*, hlm. 7.

¹² Andrew Manners, *op. cit*.

¹³ Andrew Manners, *op. cit*.

¹⁴ Singapore Ministry of Defence, “Fact Sheet : The Malacca Straits Patrol”, 21 April 2015, dalam https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2016/apr/21apr16_nr/21apr15_fs.html, diakses pada 22 Juni 2019.

berfokus pada bagaimana implementasi diplomasi pertahanan Indonesia dalam *The Malacca Strait Patrol Framework*.

Konsep Kerjasama Pertahanan

Jika melihat ancaman yang ada di Selat Malaka, maka diperlukan sebuah kerjasama pertahanan di antara *littoral states*. Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang menekankan kepentingan nasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) dijelaskan bahwa kerjasama pertahanan diselenggarakan untuk membangun sikap saling percaya antar negara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, mencegah konflik antarnegara, dan membangun kapasitas pertahanan negara. Kerjasama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu instrumen dari diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan melalui langkah-langkah konkret, saling menguntungkan, dan untuk mewujudkan stabilitas keamanan kawasan.¹⁶

Terdapat tiga dasar alasan yang melandasi pembentukan kerjasama pertahanan, antara lain:¹⁷

¹⁵ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2014).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Parulian Simamora, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

a. Penilaian ancaman (*threat assessment*)

Setiap negara mempunyai penilaian terhadap ancaman, baik itu ancaman tradisional dan non tradisional yang berasal dari aktor negara maupun non-negara. Berdasarkan penilaian terhadap ancaman tersebut, negara akan mengatur strategi pertahanan apa yang akan digunakan untuk menangkal dan mengatasinya.

b. Situasi negara

Perkembangan dan perubahan lingkungan strategis negara juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya kerjasama pertahanan. Lingkungan strategis akan berubah sesuai dengan dinamika lingkungan yang berkembang. Selanjutnya, perubahan lingkungan strategis akan mempengaruhi peta kekuatan di kawasan dan akan memengaruhi pola interaksi antarnegara. Dengan demikian, situasi negara akan melandasi proses pembentukan kerjasama pertahanan.

c. Perkembangan teknologi persenjataan

Kekuatan militer sebuah negara dapat dilihat salah satunya melalui alat persenjataan yang dimiliki negara tersebut. Setiap negara mempunyai kemampuan yang berbeda dalam hal teknologi persenjataan. Oleh karena itu, kerjasama pertahanan di bidang alutsista bertujuan untuk memenuhi pengadaan alutsista sebuah negara, modernisasi alutsista, dan transfer teknologi untuk

penelitian dan pengembangan dalam rangka mencapai kemandirian pertahanan negara.

Konsep Diplomasi Pertahanan

Secara umum, terdapat beberapa definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli terkait diplomasi pertahanan. Andrew Cottey dalam bukunya *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan sebagai penggunaan angkatan bersenjata dan juga infrastruktur terkait dalam masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan, dan lebih khususnya yaitu penggunaan kerjasama dan bantuan militer.¹⁸ Rodon Pedrason menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan semua cara dan juga strategi yang digunakan oleh negara yang mungkin sedang berkompetisi dengan negara yang lainnya, namun mereka akan menggunakan berbagai kegiatan tertentu termasuk kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan politik, serta kerjasama dan diplomasi pertahanan untuk *make friends*, dan yang paling utama adalah untuk membangun serta meningkatkan *mutual trust*.¹⁹ Pada dasarnya, terdapat tiga karakteristik utama dari diplomasi pertahanan yaitu *Defense Diplomacy for confidence building measures*, *Defense*

diplomacy for defense capabilities, *Defense diplomacy for defense industry*.²⁰

Diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan kementerian pertahanan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, membantu angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.²¹ Berdasarkan definisi terkait diplomasi pertahanan dari kedua ahli tersebut, bisa diambil beberapa poin penting mengenai diplomasi pertahanan yang bisa dikaitkan dengan isu keamanan maritim di wilayah Selat Malaka, yaitu diplomasi serta kerjasama militer yang mampu untuk membangun serta meningkatkan *mutual trust*.

Pembahasan

Upaya yang dilakukan oleh ketiga *littoral states* untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Selat Malaka dilakukan dengan membentuk mekanisme kerjasama keamanan multilateral yang dinamakan *The Malacca Straits Patrol Framework* (MSP) atau Patroli Terkoordinasi Malaysia, Singapura, Indonesia (MALSINDO). Kerjasama MSP ini mulai dilaksanakan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk menjaga keamanan

¹⁸ Andrew Cottey dan Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* (London: Oxford University Press, 2004), hlm. 6.

¹⁹ Rodon Pedrason, *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community*, Disertasi, (Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universitat, 2015).

²⁰ Budi Hartono, *Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Arms Trade Treaty (ATT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Tesis, Fakultas Strategi Pertahanan, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2016), hlm. 19.

²¹ *Ibid.*

di wilayah perairan Selat Malaka. Pada awalnya hanya ketiga *littoral states* yang terlibat kerjasama ini, namun pada tahun 2005, Thailand bergabung sebagai *observer* dan akhirnya pada tahun 2008, Thailand secara resmi menjadi anggota MSP. MSP terdiri atas kerjasama seperti *Malacca Straits Sea Patrol (MSSP)*, “*Eyes-in-the-Sky*” *Combined Maritime Air Patrols (EiS)*, dan *MSP Intelligence Exchange Group (IEG)*.²²

a. Malacca Straits Sea Patrol (MSSP)

Malacca Straits Sea Patrol (MSSP) merupakan salah satu bagian kerangka kerjasama dari *Malacca Sea Patrol (MSP)* yang berfokus pada keamanan maritim di Selat Malaka. MSSP merupakan patroli laut terkoordinasi yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kerjasama ini pertama kali diperkenalkan pada Juli 2004 dengan tujuan untuk mengurangi perompakan di selat malaka dan sekaligus untuk melakukan pengawasan di Selat Malaka melalui pusat komando ketiga negara tersebut.²³ Indonesia memiliki dua pusat komando di Batam, Kepulauan Riau, dan Belawan, Sumatera Utara. Malaysia di Lumut, Johor, Singapura memiliki pusat komando di Changi.²⁴

²² Singapore Ministry of Defence, *op. cit.*

²³ Carolin Liss & Ted Biggs, *Piracy in Southeast Asia; Trends, Hot Spots, and Responses*, (London: Routledge, 2016).

²⁴ Fajar Fitriyadi, Abubakar Eby Hara, & Supriyadi, “Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Keamanan di Selat Malaka, E-Journal Ilmu Hubungan Internasional, hlm. 6, dalam <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71596/Fajar%20Fitriyadi.pdf?sequence=1>, diakses pada 21 Juni 2019.

Dalam pelaksanaannya, MSSP dilakukan dengan menerapkan prinsip patroli terkoordinasi, bukan patroli bersama. Prinsip pelaksanaan patroli terkoordinasi berbeda dengan patroli bersama. Patroli terkoordinasi dilakukan di perbatasan wilayah masing-masing negara, kemudian kedua negara saling berkoordinasi melaporkan kondisi pada saat operasi dilakukan. Sedangkan, patroli bersama dilakukan dimana kedua negara masuk ke suatu wilayah tertentu dan melakukan patroli secara bersama-sama.²⁵ Mekanisme kerja MSSP dilakukan melalui angkatan laut yang berpartisipasi melakukan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi berbagai informasi antara kapal dengan pusat operasional angkatan laut.

b. “Eyes-in-the-Sky” Combined Maritime Air Patrols (EiS)

“*Eyes-in-the-Sky*” *Combined Maritime Air Patrols (EiS)* merupakan gabungan patroli udara maritim yang melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan Selat Malaka melalui udara. Teknis pelaksanaan dari EiS adalah menggunakan *Maritime Patrol Aircraft (MPA)* dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Masing-masing negara akan membawa *Combined Mission Patrol Team* yang terdiri dari negara tuan rumah dan *officers* lainnya dari negara-negara yang berpartisipasi.²⁶

²⁵ Marina Ika Sari, *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap India atas Kepentingan Nasional Indonesia di Samudera Hindia*, Tesis, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2017)

²⁶ Singapore Ministry of Defence, *op. cit.*

Teknis pelaksanaan EiS adalah masing-masing negara diharuskan untuk melakukan patrol udara dalam dua kali setiap minggunya. Untuk setiap penerbangan membawa misi tim patroli gabungan yang terdiri dari personil masing-masing negara partisipan. Wilayah operasi EiS mencakup wilayah udara internasional dan nasional sepanjang Selat Malaka. Sedangkan pusat operasi EiS sendiri didirikan di masing-masing negara untuk mengkoordinasikan jadwal penerbangan. Pemantauan oleh pesawat diperbolehkan hingga 3 mil laut ke perairan kedaulatan negara partisipan.²⁷

c. MSP Intelligence Exchange Group (IEG)

MSP Intelligence Exchange Group (IEG) merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan guna mendukung patroli laut dan udara yang lebih berfokus pada pengembangan dan *sharing* informasi yang disebut *Malacca Straits Patrol Information System (MSP-IS)*. MSP-IS dikelola oleh *Fusion Centre Information (IFC)* dan terdiri atas *Open and Analysed Shipping Information System (OASIS)* dan *Sense-Making Analysis and research Tool (SMART)*. Melalui MSP-IS, personil udara dan laut yang bertugas akan dengan cepat memproses dan menyampaikan informasi mengenai hasil pemantauan di wilayah Selat Malaka.²⁸

²⁷ Avia Nariyanti Putri, "Kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Selat Malaka dalam Menangani Perampokan Bersenjata Tahun 2004-2013," *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 252-253.

²⁸ Singapore Government, *op.cit.*

Nilai strategis yang dimiliki oleh Selat Malaka pada akhirnya menciptakan kepentingan nasional yang beragam bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun, seiring dengan nilai strategis tersebut, potensi ancaman di Selat Malaka menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh keempat negara tersebut. Keempat negara tersebut perlu melakukan kerjasama pertahanan guna mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Jika dianalisis dengan konsep kerjasama pertahanan, terdapat tiga hal yang membuat negara mau membentuk kerjasama pertahanan dengan negara lain untuk mengamankan wilayah perairan Selat Malaka, yaitu *pertama*, keempat negara tersebut memiliki persepsi yang sama tentang ancaman keamanan non-tradisional yang berkembang di Selat Malaka. Karena ancaman tersebut bersifat lintas batas negara, maka dibutuhkan strategi dan kerjasama antarnegara untuk mengatasinya.

Kedua, perubahan lingkungan strategis yang dinamis dimana dahulu hanya berfokus pada ancaman dari *state actor*, saat ini telah berkembang menjadi ancaman yang berasal dari *non-state actor*. Tantangan dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka ini menjadi kewajiban bagi Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand sesuai dengan UNCLOS. *Ketiga*, masing-masing negara memiliki kapabilitas teknologi militer yang berbeda. Dengan membangun kerjasama pertahanan, maka keempat negara tersebut dapat melakukan transfer

teknologi untuk mengatasi ancaman yang ada di kawasan.

Secara umum, mekanisme kerjasama MSP dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk aktivitas diplomasi pertahanan yang berupa *multilateral contacts between military officials* dan *multilateral military exercise*. Diplomasi pertahanan sendiri dapat menjadi salah satu solusi atas perbedaan pandangan yang terjadi antara Singapura dengan Malaysia dan Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki pandangan yang berbeda perihal kehadiran pihak eksternal sebagai penyedia keamanan maritim di Selat Malaka. Singapura mengizinkan negara pengguna (*user states*) untuk membantu keamanan maritim di Selat Malaka. Sedangkan, Indonesia dan Malaysia menolak kehadiran negara lain sebagai penyedia keamanan di Selat Malaka karena mengacu pada UNCLOS.²⁹ Apabila polemik tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian, maka hal tersebut akan menjadi sebuah polemik baru dalam mekanisme kerjasama pertahanan yang selama ini sudah dilaksanakan. Dengan demikian, diplomasi pertahanan yang memiliki tujuan untuk menciptakan *mutual trust* antara satu negara dengan negara yang lainnya dapat menjadi solusi alternatif atas perbedaan pandangan di antara Singapura dengan Indonesia dan Malaysia.

²⁹ David Brewster, "An Indian Sphere of Influence in the Indian Ocean?", *Security Challenges*, Vol. 6, No. 3, 2010, hlm. 1-20.

Selanjutnya, interaksi dan kerjasama antar personil militer negara-negara tersebut pada saat melakukan patroli terkoordinasi juga dapat bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas pertahanan. Peningkatan kapabilitas pertahanan tersebut khususnya pada angkatan laut dan angkatan udara tiap negara ketika mereka melakukan *sharing knowledge and training* di lapangan.

Kesimpulan

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand sepakat untuk membentuk sebuah kerjasama pertahanan MSP karena pertama, keempat negara tersebut memiliki persepsi yang sama tentang ancaman keamanan non-tradisional yang berkembang di Selat Malaka. Kedua, perubahan lingkungan strategis yang dinamis dimana dahulu hanya berfokus pada ancaman dari *state actor*, saat ini telah berkembang menjadi ancaman yang berasal dari *non-state actor*. Ketiga, dengan membangun kerjasama pertahanan, maka keempat negara tersebut dapat melakukan transfer teknologi untuk mengatasi ancaman yang ada di kawasan. MSP dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk aktivitas diplomasi pertahanan yang berupa *multilateral contacts between military officials* dan *multilateral military exercise* yang bertujuan untuk menciptakan *mutual trust* dan meningkatkan kapabilitas pertahanan masing-masing negara terutama pada personel militer. Melalui kerjasama MSP

tersebut, diharapkan dapat mereduksi ancaman yang ada di Selat Malaka sehingga kepentingan nasional masing-masing negara dan kepentingan bersama tidak terganggu.

Daftar Pustaka

Buku

- Cottey, A., & Forster, A. 2004. *Reshaping Defense Diplomacy: New Role for Military Cooperation and Assistance*. New York: Oxford University Inc.
- Liss, C., & Biggs, T. 2016. *Piracy in Southeast Asia, Trends, Hot Spots, and Responses*. London: Routledge.
- Simamora, P. 2013. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyatno, M. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Tangredi, Sam J. 2002. "Globalization and Sea Power: Overview and Context". Dalam Sam J. Tangredi (ed.). *Globalization and Maritime Power*. Institute for National Strategic Studies, National Defense University Press.

Jurnal

- Brewster, David. 2010. "An Indian Sphere of Influence in the Indian Ocean?". *Security Challenges*. Vol. 6. No. 3.
- Fitriyadi, F., Hara, A. E., & Supriyadi. "Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Keamanan di Selat Malaka". *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71596/Fajar%20Fitriyadi.pdf?sequence=1>, diakses pada 21 Juni 2019.
- Manners, Andrew. 2014. "Moving Forward, Slowly: India-Indonesia Relations in the Twenty-First Century." *Strategic Analysis Paper*.
- Putri, A.N. 2016. "Kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Selat

Malaka dalam Menangani Perampokan Bersenjata Tahun 2004-2013." *Journal of International Relations*. Vol. 2. No. 3.

Website

- Ismail, Siti Zubaidah and Sani, Mohd Azizuddin Mohd. *The Straits of Malacca: Regional Powers Vis-A-Vis Littoral States in Strategic and Security Issues and Interests*. Dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/12118559.pdf>, diakses pada 25 Juni 2019.
- Singapore Ministry of Defence, "Fact Sheet: The Malacca Straits Patrol", dalam https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2016/apr/21apr16_nr/21apr15_fs.html, 21 April 2015, diakses pada 22 Juni 2019.
- Taufan, M, "7 Hal yang Jarang Diketahui Tentang Selat Malaka", dalam <https://kumparan.com/muhammad-taufan1530163979173/tujuh-hal-yang-jarang-diketahui-orang-tentang-selat-malaka-2743110790551702>, 23 Juli 2018, diakses pada 24 Juni 2019.

Tesis

- Sari, Marina Ika. 2017. *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap India atas Kepentingan Nasional Indonesia di Samudera Hindia*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Hartanto. 2016. *Ancaman Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Selat Malaka (Kajian Laporan IMB Periode 2016) Terhadap Tegaknya Kedaulatan NKRI*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Hartono, B. 2016. *Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Arms Trade Treaty (ATT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Lestari, A. 2013. *Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka : Tawaran Proliferasi Security Initiative 2006- 2008*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Pedrason, R. 2015. *ASEAN's Defence Diplomacy : The Road to Southeast Asian Defence Community*. Disertasi.

Heidelberg : Ruprecht-Karls-
Universität.

Yunianto, M. 2016. *Kontribusi Integrated Maritime Surveillance System Terhadap Penangkalan Ancaman di perairan Selat Malaka*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.